

Disdik Kabupaten Bandung Kerahkan 5.000 ASN Tonton Piala Dunia U-17

BANDUNG (IM)- Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung akan mengerahkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) untuk menonton Piala Dunia U-17 di Stadion Si Jalak Harupat. Mereka pun tengah membahas rencana membenarkan tiket gratis kepada pelajar agar dapat menonton Piala Dunia U-17.

Kepala Disdik Kabupaten Bandung, Agus Firman mengatakan, kewajiban semua instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk ikut memeriahkan Piala Dunia U-17. Termasuk salah satunya instansi Disdik Kabupaten Bandung. "Kalau untuk piala dunia itu kewajiban semua, bukan hanya disdik tapi semua unsur Kabupaten Bandung khususnya ASN, PNS diwajibkan termasuk disdik," ucap dia, Selasa (7/11).

Untuk sementara ini, ia mengatakan Disdik Kabupaten Bandung akan mengerahkan 5.000 ASN untuk menonton Piala Dunia U-17. Seperti para kepala sekolah, para guru dan karyawan. "Sementara lima ribu orang di disdik akan bergilir," kata dia.

Dia mengatakan, rencana pemberian tiket gratis kepada pelajar agar dapat menonton pertandingan Piala Dunia U-17 di Stadion Si Jalak Harupat masih dibahas. Namun, di luar hal

tersebut Disdik Kabupaten Bandung akan mengerahkan 5.000 orang ASN.

"Masih dibicarakan (tiket gratis) dengan Pemerintah Kabupaten Bandung. Mekanismenya seperti bagaimana yang jelas diluar itu kepala sekolah, guru dan pegawai dikerahkan," kata dia.

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bandung tengah membahas rencana tiket gratis untuk pelajar agar dapat menonton Piala Dunia U-17 di Stadion Si Jalak Harupat. Namun, rencana tersebut masih dalam pembahasan bersama instansi lain. Kepala Dispora Kabupaten Bandung, Kawaludin mengatakan berbagai program dilaksanakan untuk meramaikan perhelatan Piala Dunia U-17 di Stadion Si Jalak Harupat. Di antaranya mempercantik kawasan Stadion Si Jalak Harupat dan Trophy Experience.

"Kalau untuk meramaikan piala dunia jelas satu mempercantik kawasan SOR dan kawasan pemda dengan balihoo dan umbul-umbul. Trophy experience untuk meramaikan dan publikasi menghantarkan road to Piala Dunia," ucap dia saat dihubungi, Selasa (7/11). ● **pra**

Pj Wali Kota Bandung: Kuota Ritase Sampah Tidak Bisa Ditambah

BANDUNG (IM)- Pejabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono mengatakan, kuota ritase sampah untuk Kota Bandung tetap diangka 50 persen sehingga daya angkut masih terbatas.

"Pemprov telah menghitung berdasarkan daya dukung yang ada. Jadi, keinginan untuk menambah kuota ritase sampah ini tidak bisa direalisasi," kata Bambang Tirtoyuliono pada Selasa (7/11).

Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dituntutkan ia akan memilih alternatif lain. Misalnya melakukan kerjasama dengan Kabupaten Sumedang dalam hal pemanfaatan lahan.

Tempat pembuangan akhir (TPA) Cibereum dan Cijeruk, dituntutkannya dapat menjadi solusi Kota Bandung untuk menyelesaikan persoalan sampah. Upaya-upaya ini tengah dilakukan pihaknya.

Oleh karenanya, Kota Bandung memilih alternatif lain. Kita kerjasama dengan antar daerah. Salah satu pilihannya Kabupaten Sumed-

ang. Kabupaten Sumedang memiliki dua TPA, Cijeruk dan Cibereum," ucapnya.

Pihaknya berharap, kerjasama antara Pemkot Bandung dan Pemkab Sumedang pun dapat secepatnya terjalin. Namun di lain sisi, keinginan tersebut dapat merugikan atau memberikan dampak terhadap daerah lain.

"Kita ingin secepatnya. Kita harus komunikasi intens sosial dengan masyarakat, karena jangan sampai pilihan itu menjadi fenomena baru di wilayah lain. Jadi Pak Sekda harus intens dalam hal ini," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bandung, Teddy Rusmawan mendorong Pj Wali Kota Bandung untuk meminta tambahan kuota ritase sampah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Tambahan kuota ritase, dimaksudkan untuk dapat memindahkan tumpukan-tumpukan sampah yang lebih banyak ke TPA Sarimukti. Sebab apabila musim hujan telah tiba, akan terdapat banyak kendala. ● **pra**

Ketua TP PKK Halimatu Sadiyah Temu Kader PKK di Kota Bekasi

BOGOR (IM)- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bogor, Halimatu Sadiyah Iwan mengikuti kegiatan Temu Kader sekaligus kunjungan kerja Ketua Umum TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian di Balai Patriot Kota Bekasi, Senin (6/11).

Pada kesempatan tersebut Ketua TP PKK Kabupaten Bogor mengikuti arahan Ketua Umum TP PKK Pusat. Selanjutnya, Ketua TP PKK Kabupaten Bogor mengunjungi bazar UMKM pada kegiatan Gerakan Pasar Murah (GPM). Hadir pada kegiatan tersebut, Pj. Walikota Bekasi, Pj. Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat, Pj. Ketua TP PKK Kota Bekasi, Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Bekasi, Pj. Ketua TP PKK Kota Depok, Forkopimda Kota Bekasi dan jajaran kader TP PKK.

Ketua TP PKK Kabupaten Bogor, Halimatu Sadiyah Iwan mengungkapkan, PKK adalah organisasi terbesar tidak hanya di Indonesia bahkan di dunia. PKK memiliki kader hingga ke tingkat rumah tangga, yakni Kader Dasawisma. Di sinilah kekuatan PKK untuk

bergerak, yang harus dimanfaatkan pemerintah daerah.

"PKK bukan hanya mensejahterakan kadernya, melainkan mensejahterakan masyarakat, dimana para kader adalah media untuk menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat secara langsung. Program-program PKK juga harus bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya," jelas Tri.

Oleh karena itu kita harus memberikan apresiasi kepada Ketua Dasawisma atau Ketua PKK Desa dan Kelurahan yang membawahi para Kader Dasawisma, karena mereka adalah ujung tombak suksesnya program PKK menyentuh langsung ke rumah tangg rumah tangga, katanya.

"Saya juga mengapresiasi TP PKK di Jawa Barat yang terus berkreasi dan berinovasi sehingga mendapatkan penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satunya adalah program pengentasan stunting dengan memberikan makanan tambahan yang bekerjasama dengan transportasi online seperti ojek online," tandas Tri Tito Karnavian. ● **gio**



Ketua TP PKK Kabupaten Bogor Halimatu Sadiyah bertemu kader PKK di Kota Bekasi.

8 Nusantara



SOSIALISASI PEMILU 2024 DI TERMINAL DAN PASAR KOTA BOGOR

Sejumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bogor Timur melakukan sosialisasi Pemilu 2024 di depan Terminal Baranngsiung, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (7/11). Sosialisasi untuk menginformasikan dan mengajak masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024

PASCA KEKALAHAN TIRTA KAHURIPAN LAWAN WARGA SENTUL CITY

Pengembang Bakal Tidak Dapat Hak

Selain akan melaksanakan putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Cibinong maupun Mahkamah Agung, Bupati Bogor, Iwan Setiawan juga akan menjadikan kekalahan tersebut sebagai pelajaran.

BOGOR (IM)- Bupati Bogor, Iwan Setiawan menanggapi kekalahan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan di tingkat Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung memutuskan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan kalah karena lebih mengedepankan hak rakyat," kata Iwan Setiawan kepada wartawan, Selasa (7/11).

Iwan Setiawan menuturkan bahwa kedepan, Pemkab Bogor tidak akan memberikan

hak eksklusif kepada pengembang perumahan dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

"Gak bakal ada lagi hak eksklusif, jika pengembang perumahan ingin mengelola SPAM, maka harus bekerjasama dengan Pemkab Bogor," tutur pria yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor ini.

Ia menjelaskan dengan pemberian hak eksklusif, pengembang perumahan kadang sewenang-wenang, terutama dalam tarif langganan air.

"Pemkab Bogor jangan hanya mengurus izin SPAM saja tetapi tidak terlibat dalam pengelolaan SPAMnya, mereka harus bekerjasama dengan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

harus menetapkan tarif yang sama antara warga perumahan tersebut dengan warga di wilayah lainnya," jelas Iwan.

Sebelumnya, setelah kalah di tingkat banding dan kasasi, 51 orang warga Perumahan Sentul City akhirnya mendapatkan lagi kemenangan di tingkat PK Mahkamah Agung.

Kuasa hukum warga, Imanuel Gullo pun meminta Perumda Air Minum Tirta Kahuripan selaku pihak I termohon atau yang meminta banding, untuk melaksanakan putusan tersebut, dengan cara mengelola SPAM Sentul City secara menyeluruh.

"Berdasarkan informasi perkara di website Mahkamah Agung tanggal 5 Oktober lalu, akhirnya ada keputusan inkrah terkait gugatan warga kepada Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, dimana kepu-

lusannya warga Perumahan Sentul City menang dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor diperintahkan mengelola SPAM Sentul City secara menyeluruh karena developer masih menguasai beberapa titik jaringan pipa air," pinta Imanuel Gullo.

Immanuel Gullo menerangkan walaupun penggugat 51 warga Perumahan Sentul City, namun keputusan ini diberlakukan untuk semua warga Perumahan maupun Kawasan Sentul City.

"Keputusan yang sudah inkrah ini berlaku untuk seluruh warga Perumahan maupun Kawasan Sentul City, walaupun yang menggugat atau termohon warga yang tergabung dalam Komite Warga Sentul City (KWSC)," terang pria yang tergabung dalam Amar Law Firm tersebut. ● **gio**

Achdar Sudrajat Imbau OPD Segera Melengkapi Persyaratan Raperda untuk Propemperda 2024



BANDUNG (IM)- Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Barat tengah membahas 9 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Bapemperda DPRD Jawa Barat Achdar Sudrajat saat rapat kerja pembahasan usulan dan prakarsa Raperda untuk Propemda 2024 di ruang Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jabar.

Achdar Sudrajat menjelaskan, pembahasan 9 Raperda untuk Propemperda 2024 tersebut harus selesai sebelum 15 November 2023. Oleh sebab itu, Bapemperda DPRD Jawa Barat mengimbau pengusul 9 Raperda tersebut segera melengkapi persyaratan pembentukan Raperda sesuai peraturan yang ada.

"Waktu kita saat ini terbatas, Bapemperda DPRD Jawa Barat hanya menerima usulan dari 6 sampai 15 November 2023. Kalau mau segera melengkapi (persyaratan) dalam waktu itu, bisa dan akan kita bahas. Apabila tidak lengkap harus mengembalikan ke Biro Hukum dan HAM Provinsi Jabar, dan bisa diusulkan tahun depan (2025)," jelas Achdar Sudrajat, Bandung, Senin (6/11).

Salah satu syarat yang dimaksud yaitu, naskah akademik merupakan syarat penting pembentukan Perda se-

bagaimana aturan yang ada. Apabila persyaratan lengkap, Bapemperda DPRD Jawa Barat akan membawa usulan Raperda berikut persyaratan lengkapnya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk mengonsultasikannya. Setelah konsultasi, Raperda yang diusulkan akan dianalisa untuk diketahui layak atau tidak.

"Nah rancangan tersebut nantinya akan dibahas di Panitia Khusus (Pansus) terlebih dahulu sebelum disahkan menjadi Perda," kata Achdar Sudrajat.

Di akhir, Achdar Sudrajat berharap Raperda yang sudah disahkan menjadi Perda dapat diimplementasikan dengan baik, dan disosialisasikan kepada masyarakat. Disosialisasikan oleh semua stakeholder.

9 Raperda Propemperda 2024 (Satu Raperda prakarsa DPRD Jawa Barat

1. Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

2. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050.

3. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.

4. Raperda tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha di Jawa Barat.

5. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity.

6. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat.

7. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang PT. Agronesia (Perusahaan Perseroan Daerah).

RELOKASI BENCANA CIGUDEG DAN SUKAJAYA Pemkab Bogor dan PTPN Tandatangani Pelepasan Tanah 52 Hektar



Bupati Bogor Iwan Setiawan dan PTPN melakukan penandatanganan surat pelepasan tanah 52 hektar korban bencana Cigudeg dan Sukajaya.

BOGOR (IM)- Bupati Bogor, Iwan Setiawan melakukan penandatanganan Surat Pelepasan Tanah seluas 52 hektar untuk korban bencana dari Direktur PT. Perkebunan Nusantara kepada Pemerintah Kabupaten Bogor yang diterima langsung oleh Bupati Bogor, di Ruang Rapat Bupati Bogor, Senin (6/11).

Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan, apresiasi dan terimakasih kepada PTPN yang telah membantu memberikan 52 hektar tanah untuk optimalisasi pembangunan hunian tetap di wilayah Kecamatan Sukajaya dan Cigudeg bagi masyarakat korban bencana alam tanah longsor di Kabupaten Bogor.

"Alhamdulillah kita sudah membuat hunian tetap (Huntap) sekitar 4.000 Huntap dan sudah ditempati oleh masyarakat. Mudah-mudahan dengan bantuan tanah dari PTPN ini bisa mempercepat penyelesaian Huntap di dua wilayah, Sukajaya dan Cigudeg. Sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dan perekonomian masyarakat bisa kembali bangkit," ungkapnya.

Selanjutnya, Kadis DKPP Kabupaten Bogor, Teuku Mulya mengatakan, hari ini telah dilakukan penandatanganan pelepasan hak terhadap lahan PTPN kepada Pemkab Bogor yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan proses persertifikatan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) atas nama Pemkab Bogor dan sertifikat Hak Guna Bangun (HGB) di atas HPL untuk masing masing penghuni dari hunian tetap.

"Kami sudah melakukan sosialisasi kepada warga Huntap untuk melakukan pengukuran di lokasi untuk nantinya dijadikan HPL," ujar Mulyana.

Di tempat yang sama, Direktur PTPN VIII Didik Prasetyo berharap dengan pelepasan 52 hektare bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, khususnya di Kecamatan Cigudeg dan Sukajaya.

"Terima kasih juga kepada Pak Bupati Bogor yang telah optimalisasi melaksanakan relokasi kepada para korban bencana sehingga hari ini kita bisa tindaklanjuti dari pelepasan 52 hektare tanah," ucapnya. ● **gio**